

BAB I

PENDAHULUAN

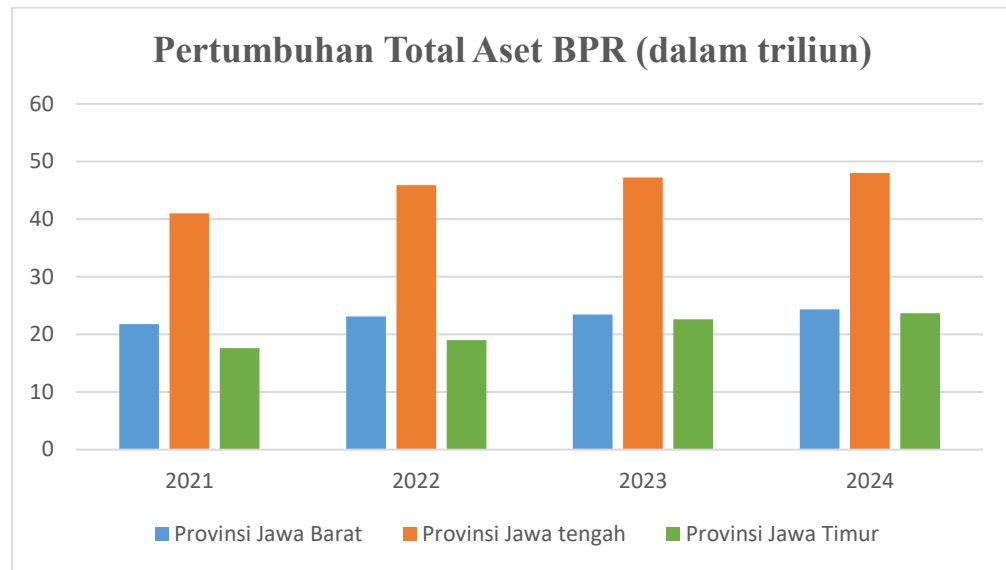
1.1 Latar Belakang Penelitian

Dalam perekonomian suatu negara, industri perbankan berperan strategis dalam mendukung dan mendorong pertumbuhan nasional. Dalam kapasitasnya sebagai intermediasi di sektor keuangan, institusi perbankan mengemban fungsi untuk menjembatani transfer dana antara pihak yang surplus dengan pihak defisit untuk keperluan kegiatan produktif (Aulia *et al.*, 2025). Melalui peran tersebut, bank membantu mengoptimalkan alokasi dana sehingga dapat memfasilitasi pembiayaan terhadap proyek-proyek investasi yang berpotensi dalam meningkatkan kegiatan ekonomi. Menurut Ismamudi *et al.* (2023), perbankan memiliki fungsi dalam mengumpulkan dana dari masyarakat untuk kemudian didistribusikan kembali, serta berperan sebagai sarana penggerak kegiatan dan pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, keberadaan perbankan yang sehat dan efisien menjadi fondasi penting untuk membangun perekonomian yang berkelanjutan.

Selain bank umum, Indonesia memiliki lembaga keuangan seperti Bank Perekonomian Rakyat (BPR) yang sangat penting untuk memperkuat perekonomian lokal. Sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), istilah *Bank Perkreditan Rakyat* resmi berubah menjadi *Bank Perekonomian Rakyat*. BPR merupakan lembaga perbankan yang berfokus pada pelayanan

kepada masyarakat menengah ke bawah, termasuk para pelaku usaha lokal di wilayah yang akses terhadap layanan perbankan masih terbatas. Tidak seperti bank konvensional pada umumnya, ruang lingkup usaha BPR lebih sempit karena tidak diizinkan memberikan layanan lalu lintas pembayaran, seperti layanan giro atau perdagangan valuta asing (OJK, 2025). Meskipun demikian, BPR memiliki peran strategis dalam memperluas akses keuangan (*financial inclusion*), memperluas pembiayaan mikro, serta menjadi sarana pemberdayaan ekonomi masyarakat daerah. BPR juga berfungsi sebagai lembaga yang mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui penyaluran kredit produktif kepada sektor-sektor riil, seperti perdagangan, pertanian, dan industri kecil. Oleh karena itu, kinerja keuangan BPR menjadi aspek yang sangat penting untuk menjaga stabilitas sistem keuangan negara, khususnya di tingkat lokal.

Pada penelitian ini, objek kajian berfokus pada BPR di Provinsi Jawa Tengah karena provinsi tersebut menjadi salah satu pusat pertumbuhan industri BPR di Pulau Jawa, dengan skala aset dan aktivitas intermediasi yang tergolong tinggi dibandingkan provinsi lainnya. Berdasarkan Portal Dataset yang dipublikasikan oleh OJK (2025), total aset BPR di Provinsi Jawa Tengah menunjukkan tren peningkatan yang konsisten selama periode 2021–2024. Total aset BPR meningkat dari sekitar Rp41,01 triliun pada tahun 2021 menjadi Rp45,86 triliun pada tahun 2022, kemudian naik lagi menjadi Rp47,22 triliun pada tahun 2023, dan mencapai Rp48,02 triliun pada tahun 2024.



Gambar 1.1 Pertumbuhan Total Aset pada BPR

Sumber: Portal Dataset OJK (2025)

Kenaikan ini mencerminkan pertumbuhan skala usaha serta ekspansi aktivitas pembiayaan BPR di wilayah Jawa Tengah. Jawa Tengah secara rutin menempati peringkat lebih tinggi daripada Jawa Barat dan Jawa Timur, dua provinsi utama lainnya di pulau Jawa. Di Jawa Barat, total aset BPR meningkat dari sekitar Rp21,79 triliun pada 2021 menjadi Rp23,10 triliun pada 2022, lalu Rp23,45 triliun pada 2023, dan mencapai Rp24,33 triliun pada 2024. Sementara itu, Jawa Timur memiliki total aset yaitu dari Rp17,63 triliun pada 2021 menjadi Rp19,02 triliun pada 2022, kemudian Rp22,63 triliun pada 2023, dan mencapai Rp23,68 triliun pada 2024. Hal ini menunjukkan bahwa Jawa Tengah memiliki kinerja permodalan dan aktivitas intermediasi BPR yang lebih besar dibandingkan dua provinsi tersebut, sehingga menjadi wilayah dengan perkembangan BPR paling dominan di Pulau Jawa.

Meskipun total aset BPR di Provinsi Jawa Tengah tumbuh dan meningkat setiap tahun, namun kinerja keuangan tidak selalu meningkat seiring dengan pertumbuhan tersebut. Berdasarkan Portal Dataset yang dipublikasikan oleh OJK, rasio *Return on Assets* (ROA) pada beberapa BPR di Kota Provinsi Jawa Tengah menunjukkan fluktuasi selama periode 2021–2024. Misalnya, PT Bank Perekonomian Rakyat Citra Darian di Kabupaten Kendal mengalami penurunan ROA dari 4,46% pada tahun 2021 menjadi 1,08% pada tahun 2024. Kondisi serupa juga terlihat pada PT Bank Perekonomian Rakyat Gunung Simping Artha di Kabupaten Banyumas yang menurun dari 3,58% menjadi 2,22% pada periode yang sama, serta PT Bank Perekonomian Rakyat Mitra Banaran Mandiri di Kabupaten Sragen yang sempat meningkat pada tahun 2022 dari 2,92% menjadi 3,85%, namun kembali menurun pada tahun 2024 menjadi 0,97%.

Tabel 1.1 Nilai Rasio ROA pada Beberapa BPR di Provinsi Jawa Tengah

No.	Kota / Kabupaten	Nama BPR	Rasio ROA (dalam %)			
			2021	2022	2023	2024
1.	Kab. Kendal	PT Bank Perekonomian Rakyat Citra Darian	4,46	4,61	3,15	1,08
2.	Kab. Banyumas	PT Bank Perekonomian Rakyat Gunung Simping Artha	3,58	3,29	2,68	2,22
3.	Kab. Sragen	PT Bank Perekonomian Rakyat Mitra Banaran Mandiri	2,92	3,85	2,75	0,97
4.	Kota Semarang	PT BPR Gunung Kawi	1,81	2,01	2,43	1,27
5.	Kota Magelang	Perumda BPR Bank Magelang	1,31	1,58	1,77	0,74
6.	Kota Surakarta/ Solo	PT Bank Perekonomian Rakyat Buana Artha Lestari	2,90	2,45	2,05	1,76

Sumber: Data diolah Peneliti (2025)

Fluktuasi yang sama juga terlihat pada beberapa BPR lainnya. Di Kota Semarang, rasio ROA PT BPR Gunung Kawi naik dari 1,81% pada tahun 2021 menjadi 2,43% pada tahun 2023 sebelum kembali ke 1,27% pada tahun 2024. Perumda BPR Bank Magelang juga mencatat pola serupa dengan kenaikan dari 1,31% menjadi 1,77% pada tahun 2023, lalu menurun ke 0,74% pada tahun 2024. PT Bank Perekonomian Rakyat Buana Artha Lestari di Kota Surakarta/ Solo juga mengalami penurunan kinerja, ROA turun dari 2,90% pada tahun 2021 menjadi 1,76% pada tahun 2024.

Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun pertumbuhan aset BPR di Jawa Tengah meningkat secara konsisten, kemampuan bank dalam menghasilkan laba dari asetnya belum stabil. Fluktuasi bahkan penurunan ROA di beberapa BPR mengindikasikan adanya tekanan terhadap profitabilitas, yang menunjukkan bahwa peningkatan aset belum sepenuhnya diimbangi dengan kemampuan BPR dalam mengoptimalkan pengelolaan sumber dayanya guna menghasilkan keuntungan yang memadai. Oleh karena itu, sangat penting untuk memahami elemen-elemen yang berkontribusi terhadap stabilitas dan keberlanjutan kinerja BPR di Provinsi Jawa Tengah.

Faktor internal yang berpotensi memengaruhi kinerja keuangan bank adalah kepemilikan kas (*cash holding*). Menurut Mariana dan Ibrahim (2021), *cash holding* menunjukkan seberapa besar proporsi kas dan setara kas yang tersedia dibandingkan dengan total aset yang dimiliki oleh perusahaan. Kebijakan kas yang dimiliki perusahaan (*cash holding*) merupakan bentuk strategi pengelolaan likuiditas guna memastikan ketersediaan dana untuk

pelunasan liabilitas jangka pendek sekaligus penyediaan modal bagi potensi investasi di masa depan. Tingkat *cash holding* yang ideal sangat penting untuk menjaga kelancaran aktivitas operasional. Jason dan Viriany (2020) mengungkapkan bahwa memiliki terlalu banyak dana kas dapat mengurangi efektivitas penggunaan aset karena dana tersebut tidak digunakan secara efektif. Di sisi lain, kekurangan kas dapat meningkatkan risiko likuiditas karena menyulitkan bisnis untuk memenuhi kewajiban jangka pendek, yang dapat berdampak buruk pada kinerja. Oleh karena itu, kunci untuk menilai kinerja keuangan bank adalah keseimbangan antara profitabilitas dan likuiditas. Hasil penelitian Knudsen *et al.* (2023) juga menunjukkan adanya hubungan *curvilinear* antara *cash holding* dan kinerja perusahaan, dengan hubungan positif yang lemah namun semakin menurun seiring peningkatan kas. Ditemukan bahwa peningkatan kas dapat meningkatkan kinerja operasional perusahaan, namun setelah mencapai titik tertentu, penambahan kas justru berpotensi menurunkan efisiensi operasional.

Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pengaruh *cash holding* terhadap kinerja keuangan tidak selalu konsisten. Penelitian oleh Yilmaz dan Samour (2024) menemukan bahwa adanya hubungan positif antara *cash holding* dengan kinerja keuangan pada tingkat tertentu karena memperkuat fleksibilitas dan stabilitas keuangan perusahaan. Selaras dengan itu, penelitian oleh Dimitropoulos *et al.* (2020) juga menemukan bahwa *cash holding* dan kinerja keuangan berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan. Penelitian lain turut memperkuat temuan yang sama dilakukan

oleh beberapa peneliti sebelumnya (Ahmed & Tahir, 2024; Jabbouri & Almustafa, 2021; Yun *et al.*, 2021). Sementara itu, beberapa penelitian lainnya menghasilkan penemuan bahwa *cash holding* perusahaan tidak secara signifikan memengaruhi kinerja keuangannya (Dewi & Mulyani, 2020; Putri *et al.*, 2024).

Di samping itu, *leverage* juga merupakan instrumen penting dalam mengukur kinerja keuangan institusi perbankan. *Leverage* didefinisikan sebagai rasio yang menunjukkan tingkat penggunaan dana eksternal atau liabilitas dalam mendanai aset serta aktivitas operasional perusahaan. Menurut Reksono *et al.* (2021), *leverage* merepresentasikan proporsi antara total kewajiban dengan keseluruhan aset atau modal perusahaan, yang mengindikasikan seberapa besar perusahaan bergantung pada sumber pendanaan eksternal. Pemanfaatan *leverage* secara optimal dapat meningkatkan kinerja keuangan karena perusahaan memanfaatkan dana pinjaman secara efisien sehingga menghasilkan laba yang besar. Di sisi lain, tingkat *leverage* yang berlebihan dapat menciptakan risiko finansial karena beban pembayaran bunga yang meningkat berpotensi menekan laba bersih dan menurunkan profitabilitas (Muttiarni *et al.*, 2023).

Dalam industri perbankan, penggunaan *leverage* juga dibatasi oleh regulasi yang ditetapkan oleh OJK guna menjaga tingkat kesehatan bank. BPR diwajibkan memenuhi rasio kecukupan modal atau *Capital Adequacy Ratio* (CAR) minimum sebesar 12% dari Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) serta modal inti minimum sebesar 8%, sebagaimana ketentuan

permodalan BPR yang ditetapkan regulator. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa penggunaan *leverage* pada BPR harus dikelola secara hati-hati karena peningkatan utang yang terlalu tinggi dapat menurunkan kecukupan modal dan meningkatkan risiko keuangan sehingga dapat memengaruhi kinerja keuangan BPR.

Sejumlah penelitian terdahulu mengungkapkan bahwa pengaruh *leverage* terhadap kinerja keuangan tidak sepenuhnya bersifat satu arah. Berbagai penelitian telah menunjukkan bahwa *leverage* berkontribusi secara positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan khususnya ROA (Kim, 2022; Moussa & Feidi, 2023). Sebaliknya, penelitian oleh Arhinful dan Radmehr (2023) menemukan bahwa *leverage* berpengaruh negatif karena besarnya beban utang meningkatkan risiko gagal bayar dan menurunkan profitabilitas perusahaan. Penelitian yang turut memperkuat temuan bahwa *leverage* berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya (García-Gómez *et al.*, 2021; Kalantonis *et al.*, 2021; Khoza, 2025; Nassim *et al.*, 2025). Di sisi lain, terdapat pula penelitian lain yang justru menemukan bahwa *leverage* tidak memiliki dampak signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan (Chadha & Sharma, 2015; Rahman *et al.*, 2021).

Dalam upaya meningkatkan kinerja keuangan, bank perlu memastikan bahwa kebijakan pengelolaan keuangan dijalankan secara efektif dan bertanggung jawab. Karena isu tata kelola perusahaan dapat berdampak, hubungan antara kebijakan keuangan seperti *cash holding* dan *leverage*

dengan kinerja keuangan tidak selalu jelas. Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) adalah salah satu elemen yang dapat memengaruhi hubungan ini. GCG adalah sebuah sistem, prosedur, dan seperangkat pedoman yang dimanfaatkan untuk mengarahkan dan mengontrol aktivitas perusahaan guna memastikan operasionalnya berjalan secara efektif, efisien, dan selaras dengan kepentingan semua pemangku kepentingan (Nuridah *et al.*, 2023). Penerapan prinsip-prinsip GCG dapat menciptakan mekanisme pengawasan yang baik terhadap manajemen dalam pengambilan keputusan keuangan.

Beberapa penelitian terdahulu telah meneliti peran GCG sebagai variabel moderasi dalam hubungan kebijakan keuangan dengan kinerja perusahaan. Yun *et al.* (2021) serta Jabbouri dan Almustafa (2021) menemukan bahwa GCG mampu memoderasi secara positif pengaruh *cash holding* terhadap kinerja keuangan karena perusahaan dengan tata kelola yang baik dapat memanfaatkan kas secara lebih efisien untuk meningkatkan profitabilitas. Di sisi lain, penelitian yang dilakukan oleh Ahmed dan Tahir (2024) menemukan bahwa GCG memoderasi secara negatif atau melemahkan pengaruh *cash holding* terhadap kinerja keuangan ketika diproksikan melalui *CEO gender* dan *family ownership*.

Sementara itu, dalam hubungan antara *leverage* dan kinerja, penelitian yang dilakukan oleh Pham dan Nguyen (2019) serta Bawuah (2024) mengungkapkan bahwa GCG yang diproksikan melalui *board size*, *board independence*, *gender diversity*, dan *state ownership* memoderasi secara

positif hubungan antara *leverage* dan kinerja keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa tata kelola yang kuat membantu perusahaan mengelola penggunaan utang secara hati-hati dan menghindari risiko keuangan berlebih. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Ngatno *et al.* (2021) serta Bhatia dan Kumari (2025) menemukan bahwa GCG tidak mampu memoderasi hubungan antara *leverage* dan kinerja keuangan ketika diukur menggunakan proksi *CEO duality* dan *ownership concentration*. Hasil dari beberapa penelitian tersebut memberi kesimpulan bahwa tidak semua mekanisme GCG berperan efektif sebagai variabel moderasi, pengaruhnya sangat bergantung pada konteks penelitian dan mekanisme GCG yang digunakan.

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan, peneliti memiliki ketertarikan dalam mengambil topik penelitian mengenai pengaruh *cash holding* dan *leverage* terhadap kinerja keuangan bank dan peran GCG sebagai pemoderasi. Penelitian ini didasari oleh adanya inkonsistensi temuan terdahulu mengenai dampak kedua variabel independen terhadap kinerja keuangan, sehingga diperlukan pengujian lebih lanjut untuk memperkuat dan memperjelas temuan empiris yang telah ada. Berbeda dari penelitian terdahulu yang umumnya mempunyai fokus pada bank umum atau bisnis publik, penelitian ini menggunakan BPR di Provinsi Jawa Tengah sebagai objek penelitian. Pemilihan ini didasarkan pada peran BPR yang penting dalam mendukung pembiayaan sektor UMKM serta karakteristiknya yang berbeda dari bank umum, terutama dalam hal struktur pendanaan dan tingkat permodalan.

Penelitian ini juga turut menggabungkan dua variabel keuangan penting, yaitu *cash holding* dan *leverage*, serta variabel moderasi yaitu GCG, yang jarang diuji secara bersamaan dalam satu model untuk melihat pengaruhnya terhadap kinerja keuangan dalam konteks sektor BPR. Oleh karena itu, mengacu pada uraian sebelumnya dan didukung oleh penelitian terdahulu, maka penelitian ini dilakukan dengan judul **“Pengaruh *Cash Holding* dan *Leverage* terhadap Kinerja Keuangan dengan *Good Corporate Governance* sebagai Pemoderasi: Studi pada Bank Perekonomian Rakyat (BPR) di Provinsi Jawa Tengah Periode 2021-2024”**.

1.2 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan pada uraian latar belakang sebelumnya, pertanyaan penelitian yang dapat dikembangkan adalah sebagai berikut:

- 1) Apakah *cash holding* berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan Bank Perekonomian Rakyat (BPR) di Provinsi Jawa Tengah periode 2021–2024?
- 2) Apakah *leverage* berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan Bank Perekonomian Rakyat (BPR) di Provinsi Jawa Tengah periode 2021–2024?
- 3) Apakah *good corporate governance* mampu memoderasi secara positif dan signifikan hubungan antara *cash holding* dan kinerja keuangan Bank Perekonomian Rakyat (BPR) di Provinsi Jawa Tengah periode 2021–2024?

- 4) Apakah *good corporate governance* mampu memoderasi secara positif dan signifikan hubungan antara *leverage* dan kinerja keuangan Bank Perekonomian Rakyat (BPR) di Provinsi Jawa Tengah periode 2021–2024?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada pertanyaan penelitian yang telah ditentukan, penelitian ini bertujuan untuk:

- 1) Menganalisis pengaruh *cash holding* terhadap kinerja keuangan Bank Perekonomian Rakyat (BPR) di Provinsi Jawa Tengah periode 2021–2024.
- 2) Menganalisis pengaruh *leverage* terhadap kinerja keuangan Bank Perekonomian Rakyat (BPR) di Provinsi Jawa Tengah periode 2021–2024.
- 3) Menganalisis kemampuan *good corporate governance* dalam memoderasi hubungan antara *cash holding* dan kinerja keuangan Bank Perekonomian Rakyat (BPR) di Provinsi Jawa Tengah periode 2021–2024.
- 4) Menganalisis kemampuan *good corporate governance* dalam memoderasi hubungan antara *leverage* dan kinerja keuangan Bank Perekonomian Rakyat (BPR) di Provinsi Jawa Tengah periode 2021–2024.

1.4 Manfaat Penelitian

Selaras dengan tujuan yang telah ditetapkan, maka penelitian ini diharapkan dapat memiliki sejumlah manfaat. Manfaat yang dimaksud dalam penelitian ini antara lain:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur tentang perbankan dan manajemen keuangan, khususnya terkait hubungan antara *cash holding*, *leverage*, dan kinerja keuangan pada BPR. Selain itu, temuan penelitian ini dapat digunakan sebagai rujukan untuk penelitian berikutnya mengenai berbagai aspek keuangan yang memengaruhi kinerja perbankan baik di sektor perbankan konvensional maupun BPR.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan memiliki beberapa manfaat antara lain:

1. Bagi Pemilik

Hasil dari penelitian diharapkan dapat membantu pemilik dalam memahami efektivitas pengelolaan *cash holding*, *leverage*, dan GCG sehingga dapat digunakan sebagai dasar dalam mengawasi keputusan keuangan dan kinerja BPR.

2. Bagi Manajemen

Hasil dari penelitian diharapkan dapat memberikan informasi dan faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan oleh manajemen BPR

dalam pengambilan keputusan keuangan yang berkaitan dengan *cash holding* maupun *leverage* agar kinerja keuangan bisa maksimal.

3. Bagi Regulator

Hasil dari penelitian diharapkan mampu menyajikan gambaran empiris mengenai kondisi keuangan dan struktur modal BPR, yang dapat digunakan sebagai saran pengembangan kebijakan dan peningkatan efektivitas pengawasan sektor perbankan.

4. Bagi Nasabah

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat tidak langsung bagi nasabah melalui peningkatan stabilitas keuangan dan kualitas layanan BPR. Pengelolaan *cash holding* dan *leverage* yang lebih baik dapat meningkatkan keamanan dana nasabah serta memperkuat kepercayaan terhadap BPR.

